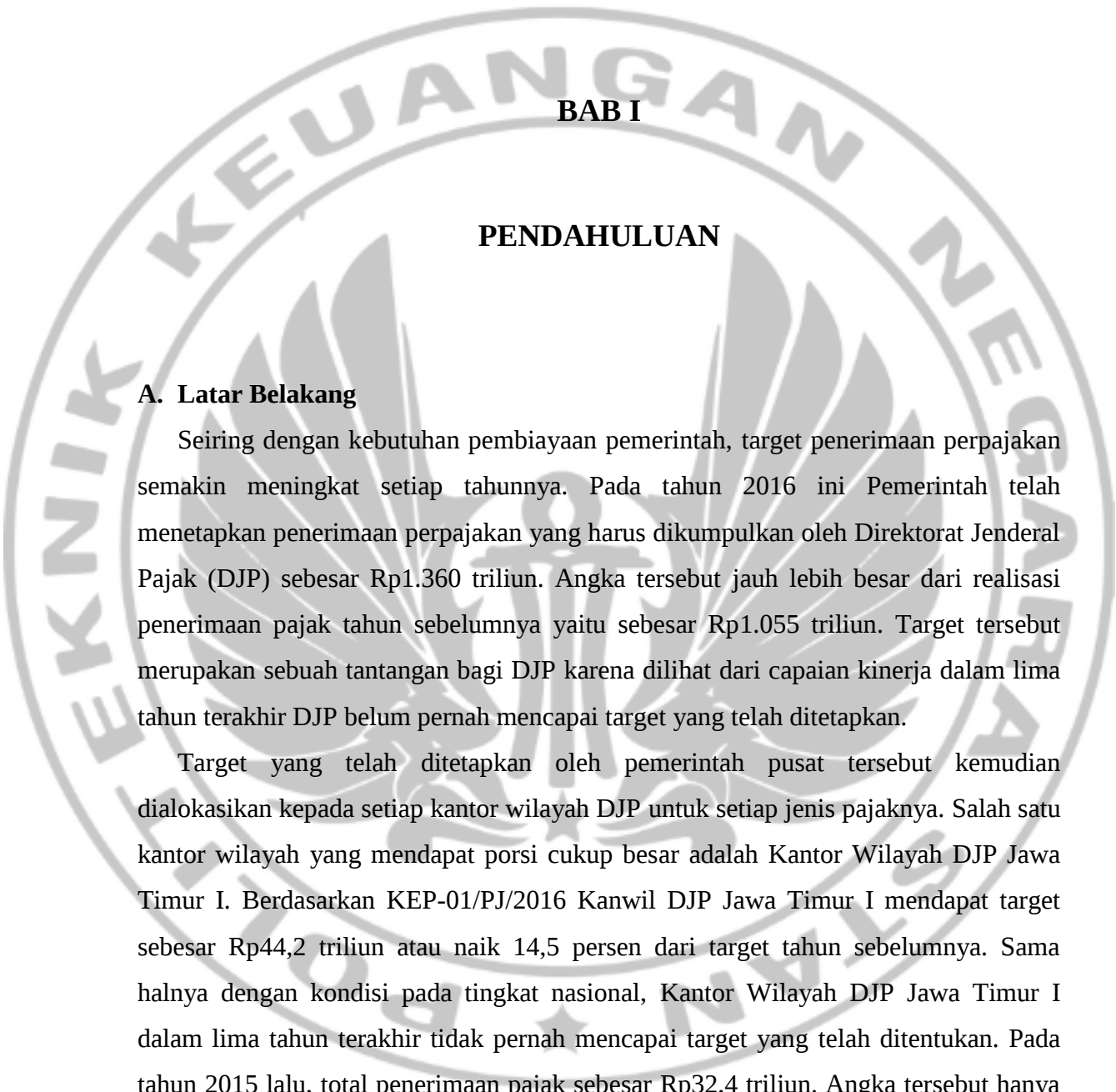




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah, target penerimaan perpajakan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 ini Pemerintah telah menetapkan penerimaan perpajakan yang harus dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar Rp1.360 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.055 triliun. Target tersebut merupakan sebuah tantangan bagi DJP karena dilihat dari capaian kinerja dalam lima tahun terakhir DJP belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

Target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut kemudian dialokasikan kepada setiap kantor wilayah DJP untuk setiap jenis pajaknya. Salah satu kantor wilayah yang mendapat porsi cukup besar adalah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Berdasarkan KEP-01/PJ/2016 Kanwil DJP Jawa Timur I mendapat target sebesar Rp44,2 triliun atau naik 14,5 persen dari target tahun sebelumnya. Sama halnya dengan kondisi pada tingkat nasional, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 lalu, total penerimaan pajak sebesar Rp32,4 triliun. Angka tersebut hanya 83,98 persen dari target, yaitu Rp38,6 triliun.

Perekonomian Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I tergolong cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,58 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2014 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya mencapai Rp365,073 triliun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi ketiga se-Indonesia dan laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota lainnya di Indonesia. Perbandingannya dapat dilihat pada Tabel I.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tersebut dapat didistribusikan menurut lapangan usahanya. Berdasarkan publikasi Statistik Daerah Kota Surabaya, lebih dari 27 persen nilai PDRB tahun 2014 disumbangkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai mencapai hampir 100 miliar rupiah. Lima sektor penyumbang PDRB terbesar Kota Surabaya tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel I.2. Berkembangnya perekonomian di Kota Surabaya tersebut menunjukkan bahwa potensi pajaknya masih banyak.

Tabel I.1

Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010-2014 (dalam miliar rupiah)

Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Jakarta Pusat	258.420	295.375	333.573	378.834	428.656
Kota Jakarta Selatan	241.225	274.379	307.190	346.964	394.348
Kota Surabaya	231.205	261.772	293.181	327.926	365.073
Kota Jakarta Utara	203.421	231.406	259.529	291.573	335.220
Kota Jakarta Timur	186.512	212.104	237.082	267.575	305.286

Sumber : diolah dari Badan Pusat Statistik

Selain besarnya pertumbuhan target, tantangan bagi DJP adalah semakin menurunnya kinerja penerimaan pajak. Hal itu dapat dilihat dari capaian *tax buoyancy* atau elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB) untuk lingkup regional (Gambar I.1). Sjafrin (2006, 6) menyatakan bahwa penerimaan pajak akan selalu mempunyai korelasi positif terhadap perkembangan PDB dalam kondisi *ceteris paribus* karena pajak

merupakan fungsi dari PDB. Hasil penelitian Sjafri menunjukkan penerimaan pajak meningkat sebesar 1% atas setiap 1% kenaikan PDB. Menurut Yustinus Prastowo dalam bisnis.com, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi pertumbuhan pajak dan *tax buoyancy* rendah mengindikasikan adanya permasalahan pada sektor tersebut.

Tabel I.2

Sektor Terbesar Penyumbang PDRB Kota Surabaya Tahun 2014

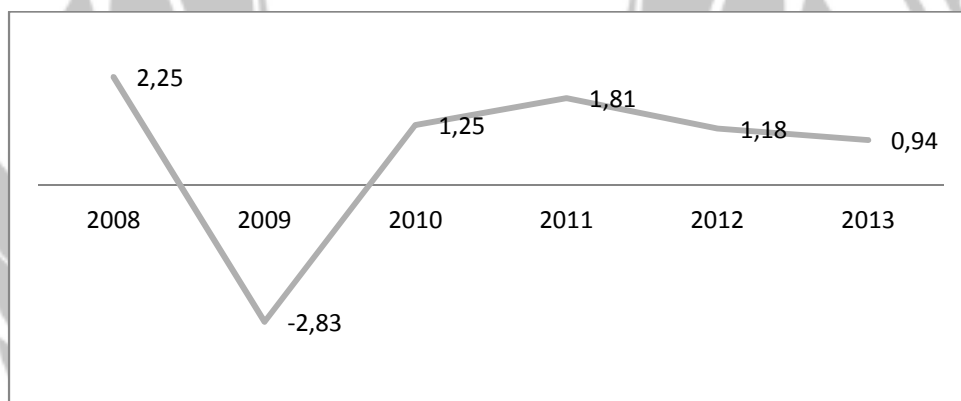
Sektor	Rp (miliar)	%
1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	99.966,84	27,38
2. Industri Pengolahan	70.661,84	19,36
3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.062,91	14,81
4. Konstruksi	37.891,84	10,38
5. Informasi dan Komunikasi	20.137,83	5,52

Sumber : *Statistik Daerah Kota Surabaya 2015*. Surabaya : BPS Kota Surabaya.

Elastisitas pajak merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meramalkan dan mengevaluasi penerimaan pajak. Ada dua istilah yang digunakan pada perhitungan elastisitas pajak yaitu *tax buoyancy* dan *tax elasticity*. Amir (2014, 8) menyatakan “*tax buoyancy* secara sederhana menunjukkan persentasi perubahan penerimaan perpajakan untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi.” *Tax buoyancy* dan *tax elasticity* merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepekaan pajak terhadap perkembangan ekonomi dan menilai efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Penelitian ini hanya akan menggunakan konsep *tax buoyancy* karena hanya mengukur kepekaan penerimaan pajak terhadap perkembangan ekonomi. Sebagai ilustrasi, PDRB riil sektor konstruksi pada tahun 2014 meningkat 20% dari tahun sebelumnya, sedangkan penerimaan pajak sektor tersebut naik sebesar 25%. Perhitungan elastisitas didapat dari pertumbuhan penerimaan pajak dibagi dengan pertumbuhan PDRB. Dengan demikian *tax buoyancy* sebesar 1,25 yang berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1%, penerimaan pajak akan meningkat sebesar 1,25%.

Prawignyo (2010, 93) melakukan penelitian elastisitas pajak untuk menghitung potensi pajak setiap sektor usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elastisitas pajaknya sebesar 0,95. Dari 10 sektor hanya dua sektor yang nilai elastisitas pajaknya dibawah satu. Itu berarti pertumbuhan penerimaan dari sektor tersebut belum mencapai kapasitas pajaknya. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penggalan potensi pajak harus mempertimbangkan potensi serta perekonomian suatu wilayah yang terbagi menjadi sektor-sektor usaha. Sektor-sektor tersebut dapat menjadi acuan dalam pengukuran potensi penerimaan pajak.

Gambar I.1
Tax Buoyancy Indonesia 2008-2013



Sumber : diolah dari Amir (2014). Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya. Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui seberapa besar elastisitas pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan kemudian elastisitas tersebut digunakan untuk menganalisis sektor/lapangan usaha yang dapat menjadi prioritas dalam melakukan penggalan potensi pajak. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menelitinya dalam suatu skripsi dengan judul **“Analisis Elastisitas Pajak Sebagai Dasar Penentuan Prioritas Penggalan Potensi Pajak Menurut Sektor Usaha (Studi Kasus di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan yaitu seberapa besar elastisitas pajak menurut sektor usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa

Timur I. Selain itu, berdasarkan analisis atas elastisitas tersebut sektor apa saja yang dapat menjadi prioritas dalam penggalan potensi pajaknya?

C. Ruang Lingkup

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I yang wilayah kerjanya meliputi Kota Surabaya. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2011 sampai dengan 2014.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar elastisitas penerimaan pajak menurut sektor usaha di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I serta untuk mengetahui sektor apa saja yang dapat menjadi prioritas dalam penggalan potensi pajak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mengenai elastisitas pajak tiap sektor serta mengetahui skala prioritas sektor usaha dalam penggalan potensi pajaknya.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan susunan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang dan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu juga dipaparkan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Landasan teori ini membahas mengenai pajak secara umum, PDRB, keterkaitan PDRB dengan penerimaan pajak, elastisitas pajak, serta Comparative Performance Index.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi data mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu, bab ini membahas definisi operasional, kerangka penelitian, periode observasi, teknik dan sarana pengolahan data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan tentang deskripsi data penelitian, hasil pengolahan data, dan analisis hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup pada skripsi yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, keterbatasan serta saran-saran dari penulis.

